



# SIARAN PERS

**Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat**

---

## **BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Majene Serta Instansi Terkait Lainnya**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan U No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK melaksanakan Pemeriksaan Kinerja berbasis solusi melalui rekomendasi (*solution-based recommendation in performance audit*) atas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Majene Serta Instansi Terkait Lainnya.

JKN adalah suatu program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh (komprehensif) bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Program JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Perlindungan ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Setelah berjalan sejak 1 Januari 2014, program JKN perlu dievaluasi sehubungan dengan masih adanya permasalahan yang muncul.

Pemeriksaan Kinerja ini ditujukan untuk menilai efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta JKN. Pemeriksaan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan pada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat pada penyelenggaraan JKN serta Instansi Terkait Lainnya untuk 2015 sampai dengan Semester I Tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Majene telah berupaya menyelenggarakan Program JKN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif yang telah dicapai antara lain telah mengalokasikan dana kapitasi dan non kapitasi sesuai ketentuan, telah memiliki kebijakan mekanisme pemanfaatan dan kapitasi, telah merencanakan kegiatan monev atas pelayanan kesehatan pada FKTP, dan perencanaan obat di FKRTL, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Belum didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai; dan
- 2) RSUD Kabupaten Majene belum mempunyai jumlah dan kualitas SDM yang sesuai standar.

**Humas dan TU Kalan - Mamuju, 6 Desember 2016**

Informasi Lebih lanjut:

**Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Jalan H. Abdul malik Pattana Endeng, Kec, Simboro, Mamuju-91512, Telp. (0426) 2325276/2325277

<http://mamuju.bpk.go.id/>